

PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MEMBENTUK PERILAKU MEMILIH PADA PEMILUKADA KOTA TERNATE TAHUN 2010

OLEH :

HASBULLAH ABD RAHIM

NIM : 070813096

ABSTRAK

Seiring dengan berlakunya kebijakan desentralisasi, kecenderungan tokoh masyarakat kemudian tidak lagi menjadi sebagai alat legitimasi pemerintah pusat tetapi tokoh masyarakat, kini lebih cenderung melihat ruang perpolitikan secara pragmatis. Namun, perebutan kekuasaan ditingkat lokal kini menciptakan kembali ruang-ruang konflik yang tajam serta memicu pula munculnya etnosentrisme dan ego kedaerahan yang berlebihan. Fakta objektif tersebut, beranggapan bahwa peranan tokoh masyarakat bersentuhan langsung dengan sistem politik yang terdesentralisir di daerah. Sehingga dari hasil penelitian selama dikota Ternate dalam studi tentang tokoh masyarakat dan perilaku memilih pada pilkada Walikota tahun 2010 dikota Ternate mengindikasikan bahwa beberapa tokoh masyarakat, diantaranya tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh intelektual memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pilkada yang berlangsung di Kota Ternate.

Perilaku memilih tokoh masyarakat cenderung diarahkan oleh kuatnya ikatan subjektif-psikologis yang syarat dengan primordialisme radikal. Dengan kata lain, bahwa kuatnya ikatan yang membentuk perilaku masyarakat yang dapat melegitimasi suatu rejim atau sistem politik tersebut dikemukakan dengan baik oleh Gabriel A. Almond dan mengatakan bahwa, berbagai mithos, doktrin dan filsafat politik menanamkan suatu penafsiran tertentu mengenai tujuan-tujuan dan norma-norma kepada setiap generasi.

Kekuatan-kekuatan primordial di tingkat lokal telah menjelma menjadi kekuatan politik yang terus direproduksi dan dimainkan oleh elite sehingga mampu mempengaruhi aktivitas politik ditingkat lokal. Menguatnya isu etnisitas ini dilakukan oleh elite antara lain dengan upaya membenturkan keberadaan satu etnis yang merasa tidak diuntungkan oleh keberadaan etnis lain sehingga mampu membangkitkan sentimen antar etnis di suatu daerah.

Kata Kunci : Tokoh Masyarakat, Prilaku Memilih, Pilkada

A. Latar Belakang

Kebijakan penyelenggaraan perpolitikan di Indonesia setidaknya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati sebuah demokrasi pada tingkat lokal yang disebut Pilkada, namun berbagai masalah kemudian muncul

sebagai bagian dari dinamika politik lokal dan hal ini menjadi tantangan bagi para elit daerah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, serta mengatur dan mengelola segala potensi daerah.

Seiring dengan berlakunya kebijakan desentralisasi, kecenderungan tokoh masyarakat kemudian tidak lagi menjadi sebagai alat legitimasi pemerintah pusat tetapi tokoh masyarakat, kini lebih cenderung melihat ruang perpolitikan secara pragmatis. Namun, perebutan kekuasaan ditingkat lokal kini menciptakan kembali ruang-ruang konflik yang tajam serta memicu pula munculnya etnosentrisme dan ego kedaerahan yang berlebihan.

B. Rumusan Masalah

Kecenderungan perilaku memilih tokoh masyarakat dikarenakan masih kuatnya ikatan kekerabatan, kesukuan, dan persaudaraan di Kota Ternate. Oleh sebab itu, penulis berupaya mengangkat masalah yang sesuai dengan rumusan masalah diatas sebagai berikut :

Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam membentuk perilaku memilih pada pemilukada Kota Ternate tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Peran Tokoh Masyarakat dalam membentuk Perilaku Pemilih pada Pemilukada Kota Ternate tahun 2010

A. Konsep Tokoh Masyarakat

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, tokoh diartikan sebagai rupa, wujud dan keadaan, bentuk dalam arti jenis badan, perawakan, orang yang terkemuka atau kenamaan didalam lapangan politik suatu masyarakat. Tokoh masyarakat, tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin didalam diri tokoh masyarakat tersebut. Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat mengidentifikasi diri kepada sang pemimpin, dan ia dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat.

B. Konsep Perilaku Memilih

Perilaku merupakan sifat alamiah manusia yang membedakannya atas manusia lain, dan menjadi ciri khas individu atas individu yang lain. Dalam konteks politik, perilaku dikategorikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok dan individu dalam

masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik

Memilih ialah suatu aktifitas yang merupakan proses menentukan sesuatu yang dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang atau kelompok, baik yang bersifat eksklusif maupun yang inklusif. Memilih merupakan aktifitas menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Surbakti (tahun:1992) menilai perilaku memilih ialah keikutsertaan warga Negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum (Surbakti, 1992:145).

C. Konsep Peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan oleh seseorang pada situasi sosial tertentu. Farley, John E (1992: 88-89)

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di wilayah Kota Ternate, yang sesuai dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti, penelitian dilakukan dan berfokus di Kota Ternate dengan subjek tokoh-tokoh masyarakat dan perannya dalam membentuk perilaku memilih pada Pemilukada Walikota tahun 2010.

B. Tipe Penelitian Dan Dasar Penelitian

Sesuai dengan tujuan serta konseptualisasinya maka penulis ingin mengetahui lebih jelas dan mendalam mengenai Peran Tokoh masyarakat dalam membentuk perilaku memilih dalam konteks Pilkada dalam pemilihan di Kota Ternate tersebut. Tipe penelitian ialah deskriptif, yaitu mencoba membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat pada suatu obyek penelitian tertentu (Mansyuri, 2008:15)

C. Penentuan Informan

Pemilihan informan yang akan peneliti wawancarai pada penelitian ini menggunakan metode dengan cara pemilihan secara *purposive*, informan dipilih berdasarkan pada tujuan penelitian dan beberapa pertimbangan tertentu.

Informan dipilih dari 4 kategori Tokoh di Ternate yakni:

1. Tokoh adat, alasan dipilihnya tokoh adat dalam penelitian ini ialah, karena tokoh adat dianggap mampu menjaga tradisi serta nilai-nilai budaya kesukuan/etnosentrisme.

2. Tokoh Agama, alasan dipilihnya tokoh agama karena tokoh agama dianggap mampu memberi pengaruh dalam konteks keagamaan.
3. Tokoh Pemuda, alasan dipilihnya tokoh pemuda ialah dikarenakan tokoh pemuda mempunyai kedekatan dengan beberapa aliansi organisasi kepemudaan yang ada di Kota Ternate
4. Tokoh Intelektual, alasan dipilihnya tokoh intelektual ialah dikarenakan mempunyai pengaruh penting dalam mengkritisi setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

PEMBAHASAN

A. Etnisitas dalam perilaku memilih Tokoh Masyarakat pada pilkada Walikota 2010 di Kota Ternate.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan baik itu tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh intelektual, mereka sangat antusias dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang penulis berikan. Namun menganggap bahwa masih banyak terdapat ketertutupan informan dalam menjawab pertanyaan dari penulis mengenai keterlibatannya pada pilkada 2010 di Kota Ternate, dalam hal ini adalah tokoh agama yakni Bapak Abubakar Assagaf saat penulis bertanya mengenai keterlibatan beliau pada pilkada 2010, beliau menjawab:

“Saya tidak terlibat secara langsung misalnya saya mendukung salah satu calon, dalam kapasitas saya sebagai tokoh Agama saya tidak menggunakan itu, tapi secara personal saya sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih, maka saya menggunakan hak pilih tersebut. Saya sangat mendukung kalo putra asli daerah yang jadi pemimpin, tapi kalo saya pemimpin itu harus punya kemampuan, akhlak yang baik, integritas, dan punya visi-misi yang jelas”.

Selain tokoh agama yang cukup dekat masyarakat, Abubakar Assagaf juga merupakan seorang pegawai negeri sipil departemen agama Kota Ternate, jadi akses informasi mengenai pilkada tentunya menjadi sesuatu yang memungkinkan masyarakat untuk menjadikannya sebagai sumber pilihan masyarakat dalam memilih pemimpin. Jika kita menyimak argumen yang dikeluarkan responden tersebut, bahwa pilihan Abubakar Assagaf pada prinsipnya cukup rasional namun masih terkesan terikat dengan ikatan-ikatan primordialisme kedaerahan. Menurut Pareto, mereka yang menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu yang terbaik. Merekalah yang dikenal sebagai elit.

Informan lain yang juga merupakan tokoh agama berpendapat bahwa pada prinsipnya pemimpin itu mesti dekat dengan masyarakat, dan memiliki kecerdasan serta akhlak yang baik untuk dijadikan panutan bagi masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Muh. Anwar Kamil saat ditemui di rumahnya:

“Saya tidak terlibat secara langsung dengan kapasitas saya sebagai seorang tokoh agama, tapi apabila secara personal iya saya terlibat dan mendukung salah satu calon. Saya sangat mendukung ketika putera dan puteri daerah yang memimpin daerahnya sendiri dan menjadi seorang pemimpin bukan hanya cerdas tapi dia mempunyai akhlak yang baik yang bisa menjadi panutan nantinya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa tokoh Agama tersebut cenderung memberikan legitimasi kepada salah satu calon, walaupun tidak secara langsung mendukung tetapi ini menunjukkan dan menganggap bahwa apa yang dibahasakan oleh tokoh Agama tersebut syarat dengan dukungan yang terselubung.

Berbeda dengan beberapa tokoh masyarakat yang lain, yang dengan tegas memperlihatkan secara langsung dukungannya bahkan dari mereka ada yang menjadi tim pemenang salah satu kandidat, tokoh tersebut merupakan salah satu tokoh Pemuda yakni, Jainul R Samsi. Berikut petikan wawancara singkat dengan beliau :

“Saya terlibat pada pilkada 2010 disini, tetapi Menang dan kalah itu biasa dalam percaturan politik, sosok pemimpin itu tidak harus mempunyai pendidikan akademis yang tinggi. Bagi saya, seorang pemimpin itu harus memiliki semangat atas perjuangan, dekat secara emosional dengan masyarakat, selalu mendukung aktifitas kepemudaan, serta memiliki semangat mau memajukan daerah dan memiliki pula kearifan lokal sebagai putra daerah”.

Pendapat serupa disampaikan salah satu tokoh pemuda Hanafi Idris

“Keterlibatan saya pada saat pemilihan pilkada pada tahun 2010 dan saya mendukung salah satu calon, bahwa saya sebagai salah satu tokoh pemuda terlibat langsung dalam pesta politik tersebut bahwa pengaruh tokoh pemuda sangat berperan penting bahwa memilih pemimpin harus mempunyai integritas yang tinggi dalam mempengaruhi masyarakat, terutama dalam kegiatan kepemudaan dan pemimpin bukan hanya cerdas tapi mampu memahami apa yang diinginkan masyarakatnya.”

Wawancara singkat dengan tokoh pemuda diatas, semakin memperkuat asumsi bahwa tokoh masyarakat cenderung mengarahkan pandangan politik masyarakat pada wacana kesukuan yang ter-cover dalam kearifan lokal. Sebagai otoritas berpengaruh, tokoh masyarakat sebagai *patron* yang mempunyai sumber kekuasaan dalam mengarahkan opini publik, tetapi hal ini berbeda dari apa yang dikemukakan oleh Prof. Kuntowijoyo yang mengatakan bahwa bangkitnya

kebudayaan modern di kota-kota –Kebudayaan sejak lahirnya– merebut tempat kebudayaan tradisional sebagai budaya yang sah bagi generasi mendatang.

Beliau menambahkan bahwa terjadi *erosi* pada kebudayaan tradisional, menuju kebudayaan nasional.¹ Memang benar apa yang dikatakan oleh Kuntowijoyo, bahwa telah terjadi pergeseran budaya tradisional menuju budaya nasional.

Di selenggarakannya pilkada diberbagai daerah, inilah yang memicu lahirnya *politik identitas* melalui *retradisionalasi budaya* yang dicover sedemikian rupa agar terkesan berwajah nasional. Munculnya kebijakan desentralisasi, memicu pula lahirnya budaya politik identitas. Di Kota Ternate sendiri, isu-isu etnisitas menjadi isu yang mencuat kepermukaan pada saat pilkada 2010 di Kota Ternate. Ini terlihat oleh hadirnya beberapa tokoh masyarakat lokal sebagai patron yang mengangkat etnisitas sebagai sebuah kekuatan politik dalam merebut kekuasaan. Ini terlihat dari terlibatnya tokoh adat (Fadli Ismail) dalam pergulatan politik di Kota Ternate. Berikut hasil wawancara dengan beliau:

“Keterlibatan saya pada waktu pilkada 2010 itu merupakan panggilan hati saya, bahkan saya berharap pilkada ini berjalan dengan baik. Bahkan saya dengan berbagai elemen masyarakat yang lain untuk menandatangani kesepakatan damai guna menjaga ketentraman dan ketertiban. Harus saya akui bahwa pengaruh adat masih sangat kental disini, tapi itu saja tidak cukup, pasti harus ada uang sebagai motor penggerak tim sukses”. Kalo saya sendiri memilih pemimpin, sudah tentu orang yang saya kenal baik. yang bisa menjaga tradisi, adat, dan dekat dengan kita secara emosional. persoalan adat menjadi cita-cita luhur yang harus dijaga oleh orang Ternate.”

Pendapat serupapun diungkapkan oleh salah satu tokoh adat dan beliau juga sebagai ketua adat Ternate menegaskan bahwa, *“Saya terlibat secara langsung, sebagai tokoh adat dan sekaligus sebagai ketua adat Ternate saya mendukung salah satu calon tapi saya tidak mengkapasitaskan diri saya selaku tokoh adat, pengaruh adat sangat penting bagaimana seorang pemimpin mengetahui budaya dan adat istiadat daerahnya, alangkah lebih bagus ketika putera daerah yang menjadi pemimpin didaerahnya sendiri”*

Setelah mewawancarai tokoh adat ditemukan bahwa kuatnya isu-isu primordialisme yang muncul pada saat pilkada 2010 di Kota Ternate mengindikasikan kuatnya faktor etnisitas dalam perilaku memilih masyarakat.

Berbeda dengan tokoh yang satu ini, yang juga merupakan kader partai Golkar yang dikenal sebagai sosok yang kritis, pemikir, serta merupakan juga tokoh organisasi pemuda dan mahasiswa. Tokoh tersebut merupakan tokoh intelektual dan masyarakat Irsyad Kasim, sesaat ditanya mengenai keterlibatan beliau pada pilkada 2010 dengan tegas beliau mengatakan :

“Iya saya terlibat pada pilkada 2010 itu, saya juga merupakan tim penggerak mesin partai politik. Bagi saya pemimpin itu harus mempunyai visi-misi dan harus terpenuhi, demi kesejahteraan masyarakat. Harus responsif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat, membangun prasarana seperti, perbaikan jalanan sehingga transportasi darat menjadi lancar, mengelola dengan baik sektor pertanian, pertanahan, dan peternakan.”

“Kalo saya pribadi, memilih pemimpin itu sederhana saja. Dia harus cerdas, berpikir sehat terutama Pendekatan terhadap masyarakat”

Tetapi setelah menanyakan apakah dia sepakat kalo pemimpin itu harus orang lokal? Beliau menambahkan, *“persoalan siapa yang memimpin orang lokal atau bukan tidak jadi masalah tapi disepanjang orang lokal masih ada yang kapabel kenapa harus orang lain, Yah.. karena pertalian darah dan kedekatan etnis itu penting guna menjaga prinsip yang berlaku didaerah ini”*

Pendapat serupapun diungkapkan salah satu tokoh intelektual Muhaimin Bahwa:

“Sebagai warga Negara yang memiliki hak pilih dan dipilih, saya terlibat secara langsung pada pilkada 2010 yang sekaligus pilkada Pertama saya di kota ternate, sebenarnya tidak masalah siapapun yang memimpin baik yang lokal maupun bukan lokal disepanjang mampu mengayomi masyarakatnya tapi kalo bisa orang lokal sendiri yang sudah mengetahui kondisi daerahnya dan salah satu yang terpenting menjunjung tinggi budaya lokal yang ada khususnya diKota Ternate ini”

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan beberapa tokoh masyarakat yang jadikan sebagai informan maka menemukan sebuah fakta konkrit bahwa ikatan-ikatan primordialisme seperti ikatan darah, kesukuan, kekeluargaan (famili) menjadi faktor yang berpengaruh dalam perilaku memilih masyarakat. Kuatnya ikatan etnisitas dan kekerabatan menjadi hal yang fundamental pada pilkada 2010 di Kota Ternate.

Etnisitas semakin menguat dan memperoleh tempatnya dalam dinamika politik lokal di Indonesia seiring dengan penerapan sistem desentralisasi pasca tumbangnya orde baru Tahun 1998.

Dalam perkembangan di Indonesia etnisitas telah mengalami proses pemanipulasian oleh elite dan dijadikan instrumen perjuangan politik dan budaya untuk memperebutkan kekuasaan. Di tingkat lokal terutama pada masyarakat dimana sistem primordial etnis masih kuat berpengaruh, identitas etnis masih menjadi daya tawar yang menarik.

Mengedepankan politik etnisitas sebagai alat negosiasi politik, bagi elite ternyata masih dianggap sebagai sarana efektif untuk merealisasikan tujuan politiknya tetapi di sisi lain upaya itu ternyata bisa menimbulkan dampak negatif berupa lahir dan tumbuhnya benih-benih konflik horizontal antar etnis yang justru menjadi faktor penghambat pencapaian tujuan.

Hasil perolehan suara pada pilkada Walikota 2010 di Kota Ternate, terpilihlah Walikota dan Wakil Walikota yakni H. BURHAN ABDURAHMAN, SH.MM & Ir. ARIFIN DJAFAR.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pada Pilkada Walikota Di Kota Ternate, mayoritas masyarakat memilih pasangan H. BURHAN ABDURAHMAN, SH.MM & Ir. ARIFIN DJAFAR Walikota dan Wakil Walikota. Alasan masyarakat memilih pasangan tersebut karena adanya ikatan primordial/kesukuan sehingga masyarakat Ternate lebih dominan memilih pasangan ini karena masyarakat dan tokoh masyarakat menganggap bahwa putera daerahlah yang seharusnya yang menjadi pemimpin didaerahnya sendiri. Ketika putera-puteri daerah yang memimpin, nilai-nilai tradisi budaya yang ada di Ternate tidak tergeser oleh budaya yang lain.

Masyarakat Ternate menganggap pasangan ini pasangan yang cocok untuk memimpin Kota Ternate kedepan karena menganggap pasangan ini adalah putera daerah Ternate yang memberi warna baru untuk daerah kedepannya dan dapat mengayomi rakyatnya.

Kesimpulan

Tokoh masyarakat sebagai pelaku pengarah opini publik harus tetap menjaga tatanan kehidupan masyarakat sehingga konflik horizontal yang terkadang melibatkan beberapa kelompok etnis dapat terhindarkan.

Dalam konteks pilkada Walikota 2010 di Kota Ternate tokoh masyarakat bukan hanya sekedar pengarah dan pengendali konflik, tetapi tokoh masyarakat diharapkan membawa semangat kedaerahan yang teraktual dalam sifat etnosentrisme.

Etnosentrisme sebagai bangunan ideology local yaitu sikap mengedepankan nilai-nilai kesukuan,kekerabatan,kekeluargaan(family), dan tradisi kedaerahan yang menjadi sebuah kekuatan politik kedaerahan.

Perilaku memilih tokoh masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan/kedaerahan dalam hal ini kesukuan yang terjadi di Ternate pada pilkada Walikota 2010.

Pada pilkada 2010 di Kota Ternate besarnya kecenderungan etnis dalam perilaku memilih tokoh masyarakat membuat pilihan-pilihan rasional menjadi hal yang urgen, hal demikian dikarenakan kuatnya pengaruh kesukuan yang membentuk pribadi dan tindakan masyarakat.

Tatanan nilai tradisi yang merupakan identitas kultur masyarakat Ternate tidak akan bisa dilepaskan dari kehidupan mereka karena,merupakan wajah kebudayaan masyarakat Ternate yang sudah mengakar sejak dulu sampai sekarang.

Kekuatan-kekuatan primordial di tingkat lokal telah menjelma menjadi kekuatan politik yang terus direproduksi dan dimainkan oleh elite sehingga mampu mempengaruhi aktivitas politik ditingkat lokal. Menguatnya isu etnisitas ini dilakukan oleh elite antara lain dengan upaya membenturkan keberadaan satu etnis yang merasa tidak diuntungkan oleh keberadaan etnis lain sehingga mampu membangkitkan sentimen antar etnis di suatu daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah lakukan, menunjukkan adanya suatu kecenderungan dominasi kelompok etnis yang satu dengan kelompok sub-etnis yang lain. Dalam perilaku memilih tokoh masyarakat pada pilkada 2010 diKota Ternate dibutuhkan kolektivitas, dan merupakan salah satu wujud bahwa dalam tokoh masyarakat dalam perilaku memilih tokoh masyarakat itu sendiri sangat berdampak pada hubungan ikatan emosional dalam hal ini ikatan kedaerahan itu sendiri.

Untuk itu, ada beberapa saran yang dianggap penting dalam mewujudkan terciptanya suatu kearifan local yang demokratis, sehingga tatanan nilai local yang tertuang dalam bidang politik dapat terealisasi sesuai dengan aturan-aturan konstitusional Negara Republik Indonesia.

1. Tokoh masyarakat sebagai mainstream politik lokal harusnya bersikap pluralis, sehingga tercipta dan terbina harmoni kehidupan masyarakat yang multicultural dan mendorong terwujudnya tatanan nilai kearifan yang berorientasi lokal dan sesuai dengan cita-cita demokratisasi.

2. Fanatisme kesukuan ditingkat daerah yang menjadi hambatan integrasi bangsa, semangat ini harusnya di formulasikan lebih demokratis dengan nilai-nilai kearifan lokal sehingga anggapan bahaya etnosentrisme dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Habib, Achmad. 2004. *Konflik Antar etnik dipedesaan*. PT. LKiS, Yogyakarta.
- Kaloh, J. 2008. *Demokrasi dan Kearifan local Pada Pilkada Langsung* , Kata Hasta Pustaka, Jakarta.
- Kuntowijoyo, 2010. *Budaya & Masyarakat*. Penerbit Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Mansyuri dan Zainuddin M, 2008. *METODOLOGI PENELITIAN Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Refika Aditama, Malang.
- Mas'ood, Mohtar dan MacAndrews, Colin. 1990. *Perbandingan Sistem Politik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nadir, Ahmad. 2005. *Pilkada Langsung dan masa depan Demokrasi*, Averroes press, Malang.
- Nasikun, 2010. *Sistem Sosial Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Rauf, Maswadi. 2001. *KONSENSUS & KONFLIK POLITIK*. PT. Grasindo. Jakarta
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2009. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Setiawan, Agus. 25 November 2008. *Sosiologi Komunikasi*, blog at wordpress.com.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *SOSIOLOGI Suatu Pengantar* . PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sihbudi, Riza & Nurhasim, Moch. 2002. *Kerusuhan sosial di Indonesia*. PT. Grasindo, Jakarta.
- Salossa S, Daniel. 2005. *Pilkada Langsung* . Penerbit Media Pressindo. Yogyakarta
- Philipus, Ng & Aini, Nurul. 2010. *Sosiologi dan Politik*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Syarbaini, Syahrial. Rahman, A. dan Djihado Monang. *Sosiologi dan Politik..* Penerbit Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor Selatan.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Mengenal tujuh tokoh Sosiologi.* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Upe, Ambo. 2008. *Sosiologi politik kontemporer,* Prestasi Pustakarya, Jakarta

Mas'ood Mohtar dan MacAndrews Colin. 1990. *Perbandingan Sistem Politik.* Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung.

[www. Wikipedia.Com/wiki/masyarakat.](http://www.Wikipedia.Com/wiki/masyarakat)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan umum](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum)

Bahan Ajar M.K Psikologi Anak Dalam Penjas PGSD Didin Budiman 4

Bahan Ajar M.K Psikologi Anak Dalam Penjas PGSD Didin Budiman 3

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan umum](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum)).

([Blog at wordpress.com,](http://blog.wordpress.com)),